

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

SATKER BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target		
				Satuan	
1	2	3	4	5	
686285	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG				
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC				
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan	
	Indikator KRO :				
	01 Persentase penanganan komplain dan penanganan pelanggaran		100	%	
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi		1	Layanan	
	Komponen Input :				
	051	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran: 1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran (2 laporan) 2. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran	3	Laporan
	052	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses: 1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran (2 laporan) 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	3	Laporan
002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan	
	Komponen Input :				
	051	Koordinasi penanganan pelanggaran	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	12	Laporan
	052	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	12	Laporan
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga	
	Indikator KRO :				
	01 Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendididkan dan pelatihan		34	Daerah	
001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga	
	Komponen Input :				
	051	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah
BKC	Pemantauan Lembaga		53	Laporan	
	Indikator KRO :				
	01 Persentase pemantauan jumlah pelanggaran yang terungkap		100	%	
001	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi		8	Laporan	
	Komponen Input :				
	051	Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
	052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	2	Laporan
	053	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan
	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	4	Laporan
	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih ,Indikator Nomor 12)	1	Laporan
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota		45	Laporan	
	Komponen Input :				
	051	Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	6	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	
					Satuan
1	2		3	4	5
	052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	12	Laporan
	053	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan
	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	21	Laporan
	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih, Indikator Nomor 12)	6	Laporan
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN BERTAHAP PENYUSUNAN DEPARTEMEN PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILU				
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			7	Lembaga
	Indikator KRO :				
	01	Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pemiluan, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan pemilu		549	Daerah
003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc			0	Lembaga
	Komponen Input :				
	053	Rekrutmen panwaslu kecamatan	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	0	Daerah
005	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi			1	Lembaga
	Komponen Input :				
	051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen
	052	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan
	053	Fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu	4	Laporan
	054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan
	055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan
	056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan
	057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota			6	Lembaga
	Komponen Input :				
	051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	6	Laporan
	052	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	12	Laporan
	053	Fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu	21	Laporan
	054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	12	Laporan
	055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	21	Laporan
	056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	21	Laporan
	057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	21	Laporan
007	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan			0	Lembaga
	Komponen Input :				
	051	Honorarium panwaslu kecamatan	Jumlah laporan honorarium panwaslu kecamatan	0	Laporan
	052	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair	Jumlah laporan sewa gedung/ peralatan/ meubelair	0	Laporan
	053	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan	Jumlah laporan pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan	0	Laporan
	054	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah laporan pelayanan administrasi perkantoran	0	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Volume / Target			
				Satuan		
1	2		4	5		
	055	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan		Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	0	Laporan
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU					
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		7		Lembaga	
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01	Jumlah orang kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	549		Daerah	
002	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi		1		Lembaga	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Publikasi dan dokumentasi	1	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	Laporan	
	052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Jumlah laporan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Laporan	
	053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Jumlah laporan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Laporan	
	054	Fasilitasi sentra gakkumdu	7	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	Laporan	
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Jumlah laporan Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Laporan	
003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		6		Lembaga	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Publikasi dan dokumentasi	6	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	Laporan	
	052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	6	Jumlah laporan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Laporan	
	053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	6	Jumlah laporan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Laporan	
	054	Fasilitasi sentra gakkumdu	6	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	Laporan	
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	6	Jumlah laporan Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Laporan	
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TENNIS LAINNYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6		Layanan	
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal	100		%	
956	Layanan BMN		1		Layanan	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	6	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan: 1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester	Laporan	
	052	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	12	Jumlah laporan inventarisasi aset persemester	Laporan	
957	Layanan Hukum		1		Layanan	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	2	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan: 1. laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Laporan supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/Kota	Laporan	
	052	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan (pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses)	Laporan	

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	
					Satuan
1	2		3	4	5
	053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	6	Laporan
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			1	Layanan
	Komponen Input :				
	051	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi: keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota	5	Laporan
	052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi: 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota	21	Laporan
963	Layanan Data dan Informasi			1	Layanan
	Komponen Input :				
	051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia: 1. Laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester 2. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik ke Kab/Kota	3	Laporan
	052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester	12	Laporan
969	Layanan Bantuan Hukum			1	Layanan
	Komponen Input :				
	051	Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
994	Layanan Perkantoran			1	Layanan
	Komponen Input :				
	001	Gaji dan tunjangan	Jumlah layanan gaji dan tunjangan	1	Layanan
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor	1	Layanan
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				Unit
	Indikator KRO :				
	01	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		80	%
951	Layanan Sarana Internal			2	Unit
	Komponen Input :				
	051	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit
	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2	Unit
	053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
	054	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit
	055	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit
	056	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
971	Layanan Prasarana Internal				Unit
	Komponen Input :				
	051	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
	052	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
	053	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
	054	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			157	Orang
	Indikator KRO :				

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	
				Satuan
1	2	3	4	5
	01 <i>Persentase penyesuaian pernyataan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>		100	%
954	Layanan Manajemen SDM		157	Orang
	Komponen Input :			
	051 Pembinaan SDM pengawas dan sekretariat Bawaslu Provinsi	Jumlah aparaturnya pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan (pegawai provinsi)	49	Orang
	052 Manajemen SDM pengawas dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan (pegawai kabupaten/kota)	108	Orang
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		139	Dokumen
	Indikator KRO :			
	01 <i>Persentase penyesuaian pernyataan manajemen kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>		100	%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		8	Dokumen
	Komponen Input :			
	051 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran: 1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran	2	Dokumen
	052 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	6	Dokumen
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		13	Dokumen
	Komponen Input :			
	051 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program: 1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota	7	Dokumen
	052 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	6	Dokumen
955	Layanan Manajemen Keuangan		86	Dokumen
	Komponen Input :			
	051 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan: 1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran	14	Dokumen
	052 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan	72	Dokumen
961	Layanan Reformasi Kinerja		25	Dokumen
	Komponen Input :			
	051 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan masyarakat	4	Dokumen
	052 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan masyarakat	21	Dokumen
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		7	Dokumen

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	
			4	Satuan
1	2	3	4	5
	<i>Komponen Input :</i>			
051	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen
052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	6	Dokumen
TOTAL				